



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

WHAT NEXT FOR PNPM?

DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

2 NOVEMBER 2011

WHAT NEXT FOR PNPM?

I. WHAT DO WE MEAN BY INTEGRATION?

- ➔ AT CENTRAL GOVERNMENT LEVEL
- ➔ AT COMMUNITY LEVEL

II. EXIT STRATEGY

- ➔ EXIT IS NOT A TERMINATION

INTEGRATION AT THE CENTRAL GOVERNMENT LEVEL

- Many empowerment programs are scattered among ministries.
- Uniformity in empowerment principles?
- Coordination in assigning location?
- Which ministry should do the “empowerment”?
- Is it better in one ministry or each ministry doing the “empowerment”?
- What is the role of other technical ministries?
- Is it better that technical ministries only provide program menu which can be accessed by the community?

INTEGRATION AT THE COMMUNITY LEVEL

- How to develop a single participative community institution which functions as a community program clearing house.
- How to produce a better-quality participative planning.
- How to develop a mechanism to ensure alignment between participative community planning and formal regular planning.
 - ➔ Without compromising the participative process.
- How to develop a mechanism to enable participative community planning be adopted into formal regular planning.
- Integration of PNPM economic activities to formal financial system.
- What to do with the financial assets owned by the communities?

EXIT STRATEGY

- What do we mean by exit?
- PNPM vs. Community Development?
- What is the role of technical ministries?
- What is the role of regional government?
- Infrastructures and assets management post-PNPM.



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

WHAT NEXT FOR PNPM?

DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN SELAKU SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

2 NOVEMBER 2011

RENCANA STRATEGIS PNPM?

I. Apa Yang Dimaksud Dengan Integrasi PNPM?

➔ Pada Tingkat **Pemerintah Pusat**

➔ Pada Tingkat **Komunitas**

II. EXIT STRATEGY

➔ Exit Strategy **Bukan Berarti Terminasi**

INTEGRASI PADA TINGKAT PEMERINTAH PUSAT

- Banyak program pemberdayaan masyarakat di berbagai Kementerian/Lembaga.
- Prinsip keseragaman dalam pemberdayaan?
- Koordinasi pada lokasi yang ditentukan?
- Kementerian/lembaga mana yang seharusnya melaksanakan pemberdayaan?
- Apakah lebih baik jika satu kementerian/lembaga atau masing-masing kementerian/lembaga melaksanakan “pemberdayaan”?
- Apa peran dari kementerian/lembaga teknis lainnya?
- Apakah lebih baik jika kementerian/lembaga teknis hanya menyediakan daftar list program yang dapat diakses oleh komunitas?

INTEGRASI PADA TINGKAT KOMUNITAS

- Bagaimana mengembangkan satu institusi partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai *program clearing house*.
- Bagaimana menghasilkan perencanaan partisipatif yang lebih baik.
- Bagaimana mengembangkan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa perencanaan partisipatif berbasis komunitas dapat menyatu dengan perencanaan reguler.
 - ➔ Tanpa mengorbankan proses partisipatif.
- Bagaimana mengembangkan suatu mekanisme yang memungkinkan hasil perencanaan partisipatif berbasis komunitas dapat diadopsi kedalam perencanaan reguler.
- Integrasi aktivitas ekonomi PNPM kedalam sistem keuangan formal.
- Apa yang harus dilakukan terhadap aset keuangan yang dimiliki oleh komunitas PNPM?

EXIT STRATEGY

- Apa yang dimaksud dengan “Exit”?
- PNPM vs. Pengembangan Komunitas?
- Apa peran dari Kementerian/Lembaga Teknis?
- Apa peran dari pemerintah daerah?
- Infrastruktur dan manajemen aset setelah-PNPM.